

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik di era abad 21 ini bukan lagi menjadi suatu hal elitis untuk dibicarakan. Jika dulu penafsiran-penafsiran politik hanya dilakukan oleh sebagian orang yang menguasai tentang kajian politik, namun sekarang batasan disiplin ilmu tidak lagi menjadi ukuran seorang untuk mengkaji tentang masalah politik. Bahkan fenomena saat ini perbincangan terkait proses politik sudah masuk dalam obrolan masyarakat sehari-hari mulai dari kelompok diskusi kecil, di warung makan, sampai interaksi antara pedagang pasar disela-sela waktunya berbincang tentang fenomena politik.

Politik dalam suatu negara pasti tidak lepas dari tujuan untuk mendapatkan kekuasaan (*power*), namun pada prinsipnya politik dalam suatu negara tidak boleh hanya ditekankan pada masalah kekuasaan (*power*) saja, tapi ia harus juga berkaitan dengan masalah-masalah terkait pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*)¹

Dalam kesehariannya kegiatan politik sering dikaitkan erat dengan suatu organisasi massa yang disebut sebagai partai politik (Parpol), hal ini karna partai politik pada dasarnya adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh para aktor politik untuk meraih jabatan politiknya. Pada awalnya partai politik lahir

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia, 2008, Hal 14.

pertama-tama di negara Eropa Barat pada akhir abad ke-19 Masehi. Kemunculan partai politik sendiri merupakan dampak dari luasnya gagasan bahwa keterlibatan rakyat merupakan salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dan diikuti sertakan dalam proses politik, yang pada masa selanjutnya menjadikan partai politik sebagai penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.²

Dari latar belakang sejarah yang tergambar dapat dilihat bahwa di Indonesia pemikiran terkait partai politik sudah berkembang lebih dari satu abad lamanya, fenomena pergerakan partai politik masih sangat menarik untuk dibicarakan terutama bila itu berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini dikarenakan sampai saat ini partai politik merupakan satu-satunya alat yang paling rasional untuk dapat menjadikan kontestan pemilu memperoleh jabatan politiknya. Terlebih lagi partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara yang paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka keberadaan partai politik tidak akan terhindarkan.

Pemilihan umum yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat

² Miriam Budiardjo. Ibid.,hal. 197-198.

konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia pesta demokrasi lima tahunan yang disebut dengan pemilu, telah berkembang lebih kurang setengah abad lamanya. Sejak kemerdekaannya bangsa Indonesia sudah sebelas kali mengadakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu pertama kali pada 1955 kemudian enam kali pemilu masa Orde Baru, satu kali di masa transisi 1999, sampai dengan pemilu terakhir 2014. Dari perjalanannya, banyak partai politik yang lahir dan banyak juga partai politik yang mengalami transformasi terbentuk yang baru. Pertumbuhan partai politik berkembang melalui sejumlah fase mulai dengan kelahiran partai dan kemungkinan berakhir dengan kematian partai, boleh jadi perkembangan sebuah partai politik tidak berkembang menjadi sewajarnya sehingga sebuah partai gagal menjelma sebagai entitas partai yang sempurna.

Setelah pemilihan umum 1999 yang merupakan gerbang pembuka masuknya *keran* demokratisasi dalam pemilu, menyebabkan banyak sekali partai politik bermunculan sebagai kontestan pemilu pada saat itu. Hampir semua mencoba menawarkan gagasan ideologi pembaharuan yang coba dilemparkan kepasar untuk mendapatkan kepercayaan publik, dimana pada pemilu yang terjadi pasca 1999 merupakan model pemilu yang ditransformasikan untuk kebutuhan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Pada saat pemilihan umum tahun 2014 terdaftar 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh yang lolos sertifikasi untuk dapat mengikuti

pemilihan umum pada tahun 2014. Dari 12 partai politik nasional yang lolos setifikasi dan maju pada pemilu 2014 kemarin, kurang lebih diisi oleh berbagai partai lama seperti, GOLKAR, PDI, PPP, PKB, PAN, PBB, PKS, PKPI, DEMOKRAT, GERINDRA, HANURA, dan satu partai pendatang baru yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan bagian dari 12 partai politik nasional yang mengikuti kompetisi pada pemilihan umum 2014 lalu.

Dalam pemilu nasional 2014 jika diklarifikasikan dalam spektrum ideologi, dari 12 partai politik nasional tersebut terdapat dua ideologi kepartaian yang mencoba berkompetisi dalam pemilihan umum 2014 yaitu partai politik yang berideologi Islam dan partai politik yang berideologi Nasionalis. Saat pelaksanaan pemilu 2014 kemarin, banyak partai politik yang mendesain strategi politiknya sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk memenangkan pemilu. Dari sekian banyak partai dan dengan prispip ideologi, visi dan misi serta haluan oraganisasi yang berbeda, ada satu hal yang menarik dari hasil pengamatan perilaku partai politik lalu, hal itu berkaitan dengan bagaimana partai politik melakukan pola rekrutmen politiknya ketika menghadapi pemilihan umum khususnya pemilihan umum 2014.

Fungsi rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara karena proses inilah yang menentukan siapa orang-orang yang akan duduk dan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang

ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Namun dalam realitasnya ada kecenderungan yang hampir mirip yang ditunjukkan oleh partai politik dalam melakukan kegiatan rekrutmen politik antara partai satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana partai politik menyeleksi calon kandidat dan kemudian menempatkannya dalam panggung politik.

Banyak anggapan bahwa partai-partai politik saat ini dicitrakan hanya sebagai penyedia jasa politik bagi aktor politik yang hendak menjadi pejabat publik, terlebih lagi munculnya fenomena kutu loncat atau mudahnya seseorang berpindah partai hanya untuk memperoleh dukungan politik dan kedudukan tertentu dalam sebuah pemerintahan menjadi masalah baru yang dialami hampir sebagian besar partai politik. Hal lain yang juga terlihat dalam pemilihan umum 2014 lalu adalah miripnya proses rekrutmen politik antara partai yang satu dengan partai politik lainnya, padahal jika ditarik dari latar belakang ideologi, visi dan misi organisasi, keseluruhan partai yang mengikuti pemilu 2014 jelas ada perbedaan antara satu dan yang lainnya khususnya perbedaan antara partai politik yang berideologi Islam dan partai yang berideologi Nasionalis.

Pola rekrutmen ini lah yang memunculkan pertanyaan bahwa sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi pola rekrutmen partai politik saat mengikuti kompetisi dalam pemilihan umum. Ada anggapan bahwa dewasa ini Parpol bertendensi mengalami stagnansi kaderisasi, partai politik dinilai lamban serta malas untuk melakukan proses kaderisasi berjenjang. Adanya justifikasi

ini tentu saja didasarkan pada fakta bahwa mesin Parpol seringkali tidak difungsikan saat periode pemilu masih lama padahal periode tersebut merupakan fase penting bagi partai dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang nantinya akan direkrut menjadi kandidat politik.

Sementara menjelang pemilu, partai politik justru berlomba-lomba untuk mendapatkan kandidat yang populer dari masyarakat untuk meningkatkan popularitas secara instan. Popularitas serta kekayaan sering menjadi menjadi faktor utama dalam proses perekrutan seseorang untuk menjadi kader partai, atau fenomena saat ini seringkali disebut sebagai kader karbitan yang hanya bermodalkan popularitas tanpa menguasai pendidikan politik serta *track record* dalam hal politik dan tentu kualitas kompetensi kader karbitan ini menjadi hal dasar yang sering dipertanyakan.

Dari latar belakang perilaku rekrutmen politik tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik yang berideologi Islam dan partai politik yang berideologi Nasionalis, dengan studi kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (NasDem) pada pelaksanaan pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana partai Partai Persatuan Pembangunan manifestasi dari partai Islam dan Nasional Demokrat manifestasi dari partai Nasionalis.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai lama yang berideologi Islam moderat, partai ini sering disebut rumah besar partai Islam karena berbagai unsur Islam politik terfasilitasi di PPP. Ketika zaman Orde

Baru, PPP menjadi artikulator perjuangan Islam politik dan tidak jarang mengambil sikap oposisional. Sedangkan Partai NasDem adalah partai politik yang tergolong baru dalam kancah perpolitikan nasional, Partai NasDem dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Jakarta, merupakan transformasi dari organisasi massa bernama Nasional Demokrat yang didirikan oleh Surya Paloh pada tahun awal tahun 2010.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi, gerakan restorasi adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³

Antara Partai PPP dan Partai NasDem menarik untuk menjadi obyek penelitian, pasalnya partai ini diharapkan mampu menginterpretasikan partai yang berideologi Islam dan partai yang berideologi Nasionalis. Dengan jarak kelahiran kedua partai yang cukup jauh diharapkan perbedaan dalam hal rekrutmen politik dapat gambar disini, namun pada kenyataannya meskipun Partai PPP sudah berpengalaman dalam hal rekrutmen politik, ternyata pada pemilu 2014 Partai PPP juga mengalami fenomena rekrutmen politik yang instan dengan ikut merekrut figur artis untuk mendongkrak popularitasnya. Sedangkan Partai NasDem yang baru berumur tiga tahun dan baru pertamakali pula melakukan rekrutmen politik pada kenyataannya telah

³ Visi-Misi Partain NasDem, Diakses dari www.partaiNasDem.org, tanggal 8 maret 2015 jam 22.00 WIB.

mampu mengungguli perolehan suara Partai PPP pada pemilu legislatif 2014 strategi yang di lakukan oleh Partai NasDem dalam mendongkrak perolehan suara juga tidak lepas dari keterlibatan publik figur yang direkrut oleh partai tersebut.

Pada pemilu 2014 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 6,53 persen sedangkan Partai Nasional Demokrat memperoleh 6,72 persen dari total jumlah suara nasional. Dengan hasil yang diraih oleh kedua partai tersebut PPP memperoleh 39 kursi DPR-RI sedangkan NasDem memperoleh 35 kursi. Perolehan kursi legislatif yang didapat Partai PPP pada pemilihan 2014 kemarin mengalami peningkatan dengan bertambahnya perolehan kursi DPR dari 38 ditahun 2009 menjadi 39 pada tahun 2014. Sedangkan untuk pemilu DIY perolehan kursi legislatif tingkat DPRD provinsi, Partai PPP hanya mampu meloloskan 2 kadernya dengan memperoleh 115.837 suara sedangkan dan partai NasDem mampu meloloskan 3 orang kadernya dengan perolehan 115.195 suara.

Dalam mempersiapkan pemilu 2014, Partai PPP melalui M. Romahurmuziy yang menjabat sebagai sekretaris jendral pada waktu itu mengatakan tantangan yang paling berat bagi partai Islam adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada partai-partai Islam, termasuk PPP. Fenomena saat ini dukungan masyarakat terhadap Parpol yang mengusung *platform* Islam sebagai garis perjuangannya terus menunjukkan

penurunan selama tiga pemilu terakhir di era reformasi, yaitu, dari 39 persen pada pemilu 1999 jatuh menjadi 30 persen pada pemilu 2009.⁴

Tantangan lain yang harus dihadapi PPP adalah semakin meningkatnya pragmatisme di kalangan pemilih. Ditemukan masyarakat hari ini lebih cenderung melihat manfaat apa yang bisa mereka peroleh dari para Caleg, baik yang sifatnya instan maupun bukan. Akibatnya, Caleg-caleg dengan wajah baru diprediksi bakal kesulitan bersaing dengan Caleg-caleg *incumbent*. Kemudian tidak kalah penting adalah melonggarnya ikatan-ikatan sosial antara *patron* dan *client*. Dulu, ketika arus informasi belum se deras sekarang politisi sangat mengandalkan masukan dari para kiai, tetua adat, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kini, hubungan seperti itu sudah kian melonggar. Para politisi tidak begitu banyak lagi bertanya kepada para patronnya tersebut.

Sedangkan dalam pemilu 2014 kemarin, Partai NasDem mempunyai target menang dalam pemilihan legislatif. Salah satu strategi kemenangannya adalah memfokuskan pada proses rekrutmen anggota partai yang menjadi tujuan utama dalam memperkuat internal partai, oleh karena itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menargetkan sepuluh juta anggota partai secara nasional tahun 2012. Partai NasDem berencana memperkuat basis kehadiran mereka dimassa akar rumput, sehingga visi merestorasi Indonesia yang diusung partai ini benar-benar tersampaikan dan dimengerti masyarakat luas. Lebih lanjut Partai NasDem memiliki target struktur

⁴<http://www.republika.co.id/berita/pemilu/wawancara/14/02/19/n181ok-ppp-pemain-lama-incar-pemilih-baru>, Diakses pada. 23-oktober 2015 jam 21.00WIB.

kepengurusan sekitar 79 ribu desa se-Indonesia dan akan memperkuat konsolidasi ideologi restorasi Indonesia agar pengurus memiliki kesamaan pemahaman sejak tingkat desa sampai pusat.⁵

Selain itu mekanisme perekrutan yang hendak dijalankan oleh Partai NasDem, dalam rumusannya tidak hanya sekedar tunjuk orang atau membajak partai lain seperti yang ramai diasumsikan. Menurut Subardi SH MH selaku ketua DPW Partai NasDem DIY dalam keterangan persnya Kamis (26/7/2014). Salah satu persyaratan perekrutan adalah orang yang direkrut bukan hanya harus memiliki kekuatan politik, kekuatan finansial, popularitas, pengalaman serta jaringan saja, namun komitmen sesuai integritas dan ideologi Partai NasDem serta kesanggupan menjadi agen perubahan untuk melakukan restorasi Indonesia adalah menjadi persyaratan utama.

Semua agenda perubahan tentang mekanisme kemenangan harus termaktub dalam kontrak politik terhadap partai, oleh siapapun yang mencalonkan di legislatif melalui Partai NasDem. Oleh karena itu, DPW Partai NasDem DIY telah bergerak untuk melakukan pendekatan personal dengan banyak tokoh di wilayah DIY, untuk diajak bergabung dan dicalonkan menjadi anggota legislatif pada pemilu 2014.⁶

Dengan berbagai ekspektasi yang dirumuskan oleh kedua partai tersebut terlihat menarik bagi peneliti untuk menelusuri tentang bagaimana pengaplikasian pola rekrutmen politik di lapangan ketika proses pemilu 2014

⁵ <http://news.okezone.com/read/2011/11/11/339/528372/tiga-langkah-partai-NasDem-setelah-lolos-verifikasi> diakses pada 24 oktober 2015, jam 23.40 WIB.

⁶ <http://krjogja.com/read/137141/partai-NasDem-siap-menangkan-pemilu-2014.kr>, diakses pada 9 oktober 2015, jam 23.40 WIB.

lalu dilaksanakan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut dari latar belakang kedua partai tersebut, peneliti berpandangan bahwa kedua partai tersebut dapat memanifestasikan pola rekrutmen politik dari dua ideologi yang berbeda, dimana Partai PPP sebagai partai yang berideologi Islam dan sudah berpengalaman dalam hal pemilu, sedangkan NasDem sebagai partai Nasionalis pendatang baru pada kancah perpolitikan nasional.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian, sehingga perumusannya perlu kejelasan dan ketegasan agar proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus pada permasalahan yang hendak diteliti.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis utarakan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti disini adalah bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik antara partai politik Islam (PPP) dan partai politik Nasionalis (NasDem) pada pemilu 2014 di tingkat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Secara konseptual, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Bina Aksara, 1996, hal. 19.

1. Mengetahui bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik partai Islam (PPP) dan Nasionalis (NasDem) pada pemilu 2014 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen politik partai dalam pemilu 2014 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengetahuan dalam bidang politik, terutama dalam hal pola rekrutmen politik partai Islam PPP dan partai Nasionalis NasDem.

2. Manfaat secara praktis

- a. Manfaat Praktis bagi peneliti adalah penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai partai politik yang lebih spesifik ke dalam perbandingan pola rekrutmen politik partai Islam PPP dan partai politik Nasionalis NasDem.

- b. Manfaat praktis bagi pihak yang diteliti adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran ataupun masukan kepada partai politik mengenai pola rekrutmen politik dalam praktiknya.

E. Kajian Teori

Dalam suatu penelitian unsur yang juga tidak kalah penting adalah kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagi peneliti teori ini menjadi acuan landasan berfikir dalam menyoroiti masalah yang akan dibahas, oleh karena itu diperlukan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang ada dimana teori–teori ini merupakan serangkaian konsep dan definisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dengan konsep. Adapun kerangka teori pada permasalahan ini adalah sebagai berikut.

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Dari sisi etimologi, menurut Laica Marzuki, kata partai berasal dari bahasa latin *pars*, yang berarti bagian. Karena satu bagian membawa konsekuensi pengertian dari bagian-bagian lain. Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti tidak sesuai dengan makna dari etimologi partai itu sendiri.⁸

Pengertian dari sisi etimologi juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqe. Partai berasal dari akar kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjukkan pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu

⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Peraturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta , Rajawali Pers, 2011, hal 30.

adalah bentuknya organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keamanan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.⁹

Dengan demikian, partai politik dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah golongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik. Dari pengertian yang ada, partai politik setidaknya dapat didefinisikan yaitu sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui gagasan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaanya dalam pemilihan umum.

Selain itu ada berbagai definisi lain tentang partai politik. Ada beberapa ahli yang memberikan konsep partai politik yang berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama, antara lain:

1. Miriam Budiarjo

⁹ Muchamad Ali Safa'at, *Ibid.*, Hal. 31.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁰

2. Carl J.Friedric

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya dimanfaatkan yang bersifat adil maupun materil.¹¹

3. Sigmund Neuman

Dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik sebagai “organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan, dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam hal ini partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan

¹⁰ Miriam Budiardjo, op.cit., Hal. 403-404.

¹¹ Miriam Budiardjo, Ibid., Hal. 404.

kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi.¹²

4. Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calonnya menduduki jabatan-jabatan publik.¹³

Partai politik merupakan bentuk dari organisasi modern yang mempunyai manajemen pengelolaan yang terstruktur guna memaksimalkan fungsinya, secara umum hal yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya seperti kelompok kepentingan (*intense group*) dan kelompok penekan (*pressure group*) adalah partai politik perhatiannya adalah pada saat pemilu, mereka sepenuh waktu berkomitmen pada aktivitas politik, mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat besar, memiliki waktu hidup yang lebih lama, serta mereka menyediakan diri sebagai simbol politik.

Selain itu partai politik dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik, sementara kelompok kepentingan dan kelompok penekan lebih memilih cara persuasi dan propaganda dalam usahanya mempengaruhi pemerintah. Jika dilihat dari fungsinya partai politik mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan

¹² Miriam Budiardjo, Ibid., Hal. 404.

¹³ Miriam Budiardjo, Ibid., Hal. 404-405.

organisasi lainnya terutama dalam hal komunikasi politik, konsolidasi politik, rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi ciri khas partai politik dan yang membedakannya dengan organisasi-organisasi lainnya.

b. Fungsi-Fungsi Partai Politik

1. Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu fungsi partai politik yang paling utama dan paling berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan maupun sosial masyarakat adalah fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik. Pada suatu negara, sistem politik yang sehat harus didukung oleh komunikasi politik yang dijalankan dan digiatkan oleh partai-partai politik. Partai politik ini adalah pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas berjalannya komunikasi politik.

Menurut Sigmund Neuman, dalam hubungan dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹⁴ Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam dalam

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Ibid.*, Hal. 405.

suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) dan kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisai dan konsolidasi politik.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.¹⁵

Sisi lain dari fungsi sosialisai partai politik adalah upaya partai politik untuk menciptakan citra (*image*) bahwa memperjuangkan kepentingan umum adalah bagian dari misi partai politik. Dari proses sosialisai politik ini sedikit banyak akan mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat dalam menyikapi fenomena politik.

3. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan bagian terpenting dalam proses menjalankan fungsi kepartaian, karena melalui kegiatan ini partai dapat menjaga kelangsungan dari sistem pengkaderannya dan menjalankan fungsinya sebagai partai

¹⁵ Miriam Budiardjo, Ibid., Hal. 406.

politik secara nyata. Fungsi rekrutmen partai politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik karena fungsi ini sekaligus menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Rekrutmen merupakan sebuah kebun rahasia politik, yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap apalagi terbuka untuk umum. Oleh karena itu pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat menjelaskan banyak hal dalam dinamika politik partai yang ada.

4. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik

Konflik merupakan sebuah fenomena yang terjadi akibat adanya perbedaan antara kehendak dan realitas yang terjadi dan mengakibatkan gesekan antar bagian yang berujung pada peselisihan hingga menyebabkan konflik atau pertentangan. Potensi konflik yang selalu ada di setiap masyarakat terutama pada masyarakat yang bersifat heterogen peran partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisatoris antara warga negara dengan pemerintah ataupun kelompok politik lain.

Disini lah peran partai diperlukan untuk membantu mengatasi gesekan yang diakibatkan realitas politik. Atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat dari gesekan tersebut dapat ditekan sedemikian mungkin

terutama konflik yang melibatkan masa arus bawah yang berjumlah besar guna tetap menjaga kestabilan politik.

c. Tipologi Partai Politik

Dalam studi kepartaian pemahaman tentang tipe partai dapat berguna untuk memahami keragaman partai yang kompleks, kompleksitas realitas partai politik itu oleh para ahli kepartaian berusaha disederhanakan dalam beberapa tipologi tertentu. Tipologi kepartaian ini menunjuk pada karakter-karakter khusus dari satu partai sehingga partai itu dapat dikategorikan dalam tipe kelompok atau model tertentu.

Berangkat dari kompleksitas tersebut Krouwel dalam Katz dan Crotty, mengusulkan metode paling sederhana dan jelas dalam membedakan partai politik berdasarkan perbedaan karakteristik utamanya. Berdasarkan kemiripan dan ciri-ciri khusus, Krouwel telah mengelompokkan beragam tipe partai politik kedalam lima jenis dasar, yaitu:

1) Partai Kader

Partai kader pada umumnya berstruktur longgar, sangat elit sentris dan dipimpin oleh individu yang terkemuka, diorganisir dalam kasus-kasus tertutup dan kedaerahan dengan organisasi di luar parlemen yang sangat sedikit. Dimensi asal usul partai ini berasal dari dalam parlemen, yaitu sebagai bagian dari elit yang

berkuasa di dalam struktur parlemen yang berusaha mempertahankan eksistensinya di panggung politik. Dari dimensi ideologi partai ini menekankan pada usaha untuk melakukan perluasan kompetisi partai yang lebih luas. Mengandalkan pada pesona basis status personal dan kemakmuran yang dimiliki oleh individu-individu partai.

2) Partai Massa

Merujuk pada Wolinetz, salah satu ciri terpenting dalam partai massa adalah partai ini senantiasa berorientasi pada kebijakan (*Policy-seeking*).¹⁶ Asal usul kelahiran partai ini adalah dari luar parlemen, kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat berusaha mempengaruhi arah politik negara dengan cara masuk ke dalam struktur kekuasaan.

Kelompok-kelompok sosial ini ingin mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politiknya sendiri, perdebatan untuk mengambil posisi kebijakan yang intensif, fokus dan hampir melibatkan semua level partai. Akibatnya konsistensi asumsi posisi kebijakan dengan ideologi partai sangat tinggi. Ketika kampanye pemilu tiba sangat kuat menonjolkan program atau kebijakan dan umumnya strategi kampanye mengikuti kebijakan.

3) Partai Catch-all

¹⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek Di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. Hal. 37.

Partai catch-all berasal dari partai massa yang memprofesionalisasi organisasi kepartaiannya dan melakukan penyesuaian ideologi dengan tujuan bisa merangkul pemilih yang lebih luas dari basis luar kelas maupun agama mereka berasal maupun kelompok-kelompok sosial di luar lingkarannya. Asal usul partai ini adalah transformasi dari partai massa pertalian atau penyatuan antara massa dengan kelompok kepentingan.

Basis kompetisi partai ini adalah kualitas manajemen sektor publik mengupayakan sejauh mana persoalan publik dapat dikelola sedemikian rupa sesuai dengan kehendak mayoritas pemilih, dan perluasan kompetisi partai dilakukan dengan kompetisi yang bersifat sentripetal dalam teknikalitas. Pada saat pemilu penonjolan tentang kebijakan fluktuatif tergantung pada sejauh mana penonjolan itu memberikan keuntungan pada elektoral dan penggunaan teknik-teknik baru dalam pemilu seperti pemasaran politik yang sangat tinggi.

4) Partai Kartel

Asal usul partai kartel bercirikan peleburan partai di jabatan publik dengan beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel politik, dengan tujuan utama mempertahankan kekuasaan eksekutif. Partai ini berbentuk organisasi-organisasi profesional yang survivalitasnya sangat

bergantung pada negara dan secara perlahan mundur dari masyarakat sipil dan membatasi fungsinya hanya sekedar pemerintahan saja.

Basis kompetisi partai dalam berkompetisi dengan partai lain adalah perawatan kekuasaan yang tumbuh dari pembagian jabatan eksekutif. Dukungan kekuasaan pilar utama basis kompetisi partai, dan perluasan kompetisi partai juga dilakukan dengan penyebaran ketidaksesuaian politik, permainan isu dijadikan sebagai media untuk perluasan kekuasaan. Menurut Wolinetz, orientasi partai ini adalah pencari jabatan (*office-seeking*) sehingga debat internal tentang kebijakan partai terbatas dan walaupun ada kurang fokus dan terbatas pada pimpinan partai atau komite kebijakan. Konsistensi kebijakan relatif rendah dan dalam kampanye tidak menonjolkan kebijakan dengan pilihan strategi kampanye yang beresiko rendah.¹⁷

5) Partai Firma Bisnis

Tipe partai politik firma bisnis ini muncul dari inisiatif pribadi para entrepreneur politik dan sebagian besar memiliki struktur perusahaan komersil. *Image* pemimpin partai politik ditambah beberapa isu hangat dilemparkan ke pasar pemilih yang sangat dinamis melalui sebuah organisasi profesional. Dimensi ideologis partai ini adalah isu dan personalitas individu

¹⁷ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 40.

sebagai sebuah produk politik, perluasan kompetisi partai dilakukan dengan perjuangan permanen untuk mendapatkan perhatian media secara terus-menerus.

Partai firma bisnis ini merupakan kategori baru dalam studi kepartaian, partai tipe ini menempatkan pemilih, pengurus, ideologi dan organisasi partai bukan sebagai sesuatu yang penting dalam menggerakkan partai. Eksistensi partai terutama berporos pada kemampuan dari wirausahawan politik untuk membangun pencitraan partai secara terus menerus oleh karenanya pemanfaatan teknik-teknik baru dalam kampanye pemilu senantiasa digunakan untuk memperoleh kemenangan.

d. Sistem Kepartaian

Dalam upaya memahami sistem kepartaian telah banyak pendekatan yang berusaha dikembangkan, keseluruhan gagasan yang muncul bergerak dalam satu konsepsi untuk mengetahui cara yang tepat bagaimana interaksi antar partai terjadi. Memahami sistem kepartaian juga dapat menggambarkan bagaimana sistem politik yang terjadi disebuah negara menginterpretasikan spektrum dan distribusi kekuatan politik disuatu negara apakah kekuatannya terfragmentasi atau terkonsolidasi. Secara garis besar setidaknya terdapat empat pendekatan dalam memahami sistem kepartaian dalam sebuah negara, yaitu:

1) Berbasis Numerik

Pendekatan kepartaian berbasis numerik merupakan pendekatan paling klasik dalam memahami sistem kepartaian. Pendekatan ini melihat bahwa sistem kepartaian dapat dibagi berdasarkan sistem partai tunggal, dua partai, dan sistem multi partai diukur dengan jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen. Pada sistem partai tunggal terdapat satu kekuatan partai politik yang dominan di dalam parlemen.

Sementara itu pada sistem dua partai terdapat dua partai besar yang menguasai parlemen dimana ketika salah satu partai menjadi penguasa partai yang lain menjadi kekuatan oposisi. Sedangkan sistem multi partai dapat dikategorikan terdapat kekuatan partai politik dalam jumlah banyak yang menguasai parlemen sehingga tidak ada kekuatan dominan yang bisa berdiri sendiri dalam menopang pemerintahan.

2) Berbasis Ukuran dan Kekuatan Relatif Partai

Jean Bondel (1986) adalah salah seorang yang pertama kali bergerak di luar perhitungan sederhana yang menimbang ukuran dan kekuatan relatif partai politik. Bondel membedakan persektif sistem kepartaian dalam beberapa bentuk dengan tipologi yang diperoleh dari memperhatikan bagian rata-rata suara yang dimenangkan oleh dua partai terbesar dan kemudian

mempertimbangkan perbandingan bagian partai pertama, partai kedua dan ketiga.¹⁸ Berikut variasinya:

Pertama, sistem dua partai adalah ketika bagian dua partai lebih besar dari 89%, masuk dalam kategori ini adalah Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Inggris Raya, dan Austria. Kedua sistem dua setengah partai adalah bagian dari dua partai bergerak dari 75% hingga 80% suara tapi disana terdapat perbedaan rata yang lebih besar (10,5%) antara partai pertama dan kedua. Negara-negara dalam kategori ini adalah Kanada, Republik Fedral Jerman, dan Irlandia. Ketiga, sistem multi partai *predominant* ketika terdapat satu partai besar memperoleh suara mencapai 40% atau lebih, contoh negara dalam sistem ini Swedia, Norwegia, Denmark, Italia, dan Islandia. Keempat, sistem multi partai tanpa partai *predominant* adalah ketika tidak ada partai yang mencapai angka 40%. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah Belanda, Swiss, Prancis, dan Finlandia.

3) Pola Formasi Pemerintahan

Klasifikasi model ini dapat juga disebut dengan klasifikasi berdasarkan pola oposisi partai. Pendekatan berdasarkan pola oposisi partai di arena elektoral dan legislatif dapat dibagi menjadi empat skema. Pertama, *strictly competitive*, kedua

¹⁸ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 46.

coompetitive and competitive, ketiga *coalescent and competitive* dan keempat *strictly coalesent*.

4) Berbasis Jumlah dan Jarak Ideologi

Pendekatan ini dikonseptualisasikan oleh Sartori (1976). Ia menyatakan bahwa kriteria partai berdasarkan jumlah tetap penting tetapi harus diingat sejauh mana partai itu mempengaruhi efek dalam kompetisi partai. Boleh jadi partai kecil akan menjadi relevan jika memiliki potensi koalisi dan potensi *blackmail*. Potensi koalisi tergantung pada partai yang memiliki kursi cukup untuk membentuk koalisi dan diukur dengan partisipasi mereka dalam membentuk kabinet koalisi akan menjadi mungkin.

Partai yang kursinya tidak pernah dibutuhkan dianggap tidak relevan. Sementara itu partai besar atau kecil menjadi relevan ketika keberadaan mereka mengubah arah kompetisi partai kekiri atau kekanan, merubah kompetisi dari sentripetal menjadi sentrifugal.¹⁹

Dalam hal ini Sartori membagi sistem kepartaian dalam tujuh kategori, yaitu: sistem partai tunggal (*one party*), partai hegemonik (*hegemonic party*), partai dominan (*predominan party*), dua partai (*two party*), pluralisme terbatas (*limitet pluralism*), pluralisme ekstrim (*eksprime pluralisme*), dan atomik (*atomized*). Ketujuh sistem kepartaian itu dapat dirangkum dalam

¹⁹ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 48.

dua kategori besar pertama sistem non kompetitif multipartai tunggal dan partai hegemonik.

Sistem kepartaian non-kompetitif sering disebut juga dengan sistem partai negara. Pada kategori ini keberadaan partai politik identik dengan negara sehingga sulit membedakan antara partai politik dengan negara. Dengan kata lain sesungguhnya tidak ada sistem kepartaian dalam kondisi ini karna struktur sistem politiknya berpusat pada negara dan kehadiran partai politik identik dengan kepentingan negara dengan cara membatasi ruang gerak partai politik. Kedua yaitu sistem kompetitif meliputi partai dominan, dua partai pluralisme terbatas atau moderat, pluralisme ekstrim atau terpolarisasi, dan atomik.

Pada sistem kepartaian sistem kompetitif negara melindungi hak-hak partai politik melalui konstitusi untuk menjalankan fungsinya dengan mendorong modernisasi, khususnya aspek mobilisasi sosial yang berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat beserta ide-idenya.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan sebuah kebun rahasia politik, yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap apalagi terbuka untuk umum. Fungsi ini sangat erat kaitannya dalam proses seleksi kepemimpinan di dalam tubuh partai bahkan sampai kepemimpinan nasional. Partai politik membutuhkan kader-kader partai

yang bekerja dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan partai. Apabila kader partai sudah memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik, maka partai politik bisa turut aktif menyumbangkan kadernya dalam mengisi kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin. Adapun cara untuk melakukan rekrutmen politik seperti melalui kontak pribadi, persuasi atau cara-cara lain.

Menurut Sigit Pamungkas, dinamika rekrutmen partai politik dapat menjelaskan banyak hal pertama, rekrutmen politik dapat menunjukkan lokus dari kekuasaan partai yang sesungguhnya, apakah kekuasaan partai bersifat oligarkis atau bersifat menyebar. Kedua, rekrutmen politik dapat menggambarkan perjuangan kekuasaan internal partai politik. Pertaruhan survivalitas politik individu dan faksi-faksi dalam partai dalam rekrutmen politik dapat digunakan untuk melihat bagaimana politik distribusi kekuasaan di dalam partai terjadi. Ketiga, rekrutmen politik dapat menunjukkan politik representasi yang berusaha dihadirkan oleh partai politik. Keempat, rekrutmen politik dapat menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi. Apakah sirkulasi elit itu mengacu pada proses dimana individu-individu diantara elit atau non-elit, atau mengacu pada proses dimana elit yang satu digantikan oleh elit yang lain.

Kelima, pasca rekrutmen politik, wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai

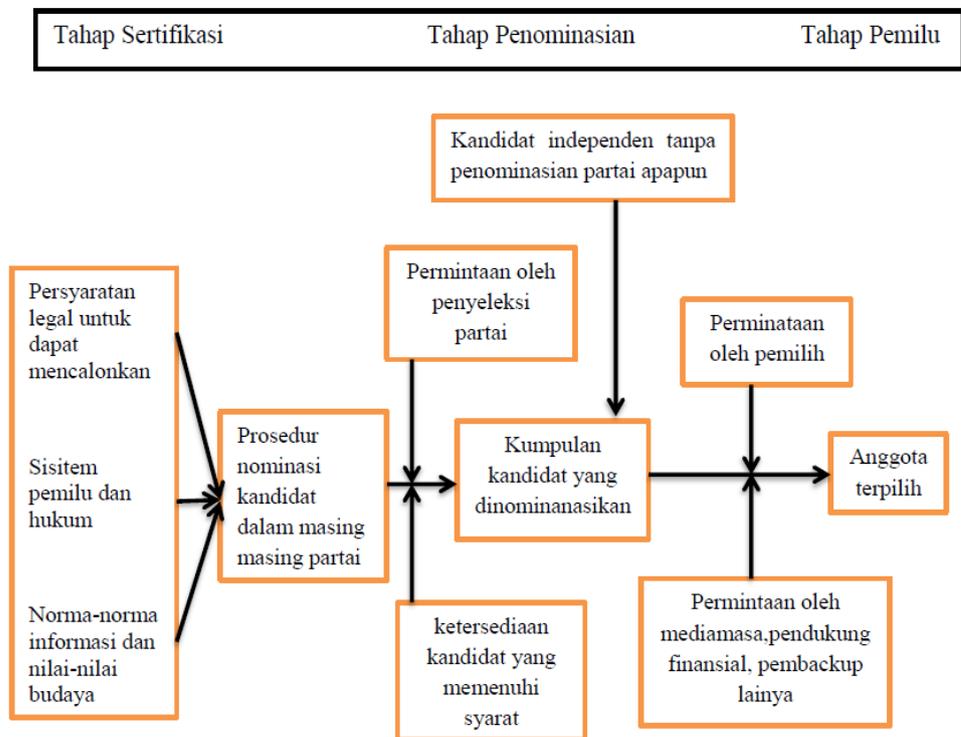
politik. Seperti siapa yang direkrut, dari mana asalnya, bagaimana pengalamannya, apa ideologinya, dan bagaimana kapasitasnya akan menjadi petunjuk awal wajah partai politik diruang publik. Terahir, rekrutmen politik berada pada posisi sentral dalam mendefinisikan tipe kepartaian. Apakah sebuah partai tersebut sebagai partai kartel, catch-all, kader, massa, atau partai *business-firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan.²⁰

Dalam studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat, rekrutmen legislatif, dan eksekutif tetapi ada yang berusaha menarik garis batas antara istilah-istilah tersebut sebagai konsep yang berbeda dan ada pula yang menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bagi yang membedakan, rekrutmen politik didefinisikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik, sedangkan seleksi kandidat adalah proses bagaimana kandidat dipilih dari kumpulan kandidat potensial. Sementara itu rekrutmen legislatif berbicara tentang bagaimana kandidat yang didominasi partai terpilih menjadi pejabat publik.

Menurut Norris dalam Katz dan Crotty (2006) terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu meliputi sertifikasi, pendorinasian, dan tahap pemilu.

²⁰ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 91.

Gambar 1.1
Tahap-Tahap Rekrutmen Politik



Sumber: Norris, dalam Katz dan Crotty (2006:90)

Dari bagan diatas dapat dijelaskan tahapan sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang memenuhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang

dinominasikan. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.²¹

Perlakuan partai terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan?
2. Siapa yang menyeleksi?
3. Dimana kandidat diseleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola-model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah di antara ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam model inklusif adalah setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara untuk model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan di luar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, yaitu persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

²¹ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 92.

Tabel 1.1
Kandidat Yang Dapat Didominasi

Kandidat	Model
Semua Warga Negara	Inklusif
Anggota Partai + Syarat Tambahan	Eksklusif

Tentang siapa yang menjadi penyeleksi, penyeleksi adalah lembaga yang diberikan otoritas untuk menyeleksi kandidat yang dapat disebut sebagai lembaga yang berisi satu orang, beberapa orang, atau banyak orang sampai pada pemilih. Model penyeleksi kandidat dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitasnya. Pada titik ekstrim penyeleksi adalah sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Dalam ekstrim lainnya, selector sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

Tabel 1.2
Metode Penyeleksian Kandidat

Penyeleksi	Model
Pemilih	Inklusif
Pimpinan Partai	Eksklusif

Sementara itu pengorganisasian rekrutmen untuk menunjukkan dimana kadidat diseleksi, secara ringkas terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur

yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional.

Tabel 1.3
Sektor Kandidat Diseleksi

Metode	Model
Terpusat	Sentralistik
Lokal	Desentralisasi

Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan. Desentralisasi fungsional adalah seleksi kandidat dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas, dan sebagainya.

Dalam memahami seleksi kandidat yang akan berpengaruh terhadap bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu²²: pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang

²² Sigit Pamungkas. Ibid. Hal 100

penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi metode ini dapat disebut sebagai metode demokrasi. Sementara dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai yang bisa disebut dengan metode otoriter.

Tabel 1.4
Kandidat Diputuskan

Metode	Model
Demokratis	Pemilihan
Otoriter	Penunjukan

Didasarkan pada peran yang akan mereka mainkan dalam organisasi serta harapan yang mereka inginkan, terdapat dua tipe aktivis partai yang dihasilkan dalam proses seleksi kandidat, yaitu tipe aktivis partai profesional (*praktis*) dan tipe aktivis partai amatir (*amateur*). Tipe yang pertama, pekerja partai yang loyal utamanya ditunjukkan pada partai itu sendiri dan gaya bekerjanya adalah pragmatis. Mereka adalah pendukung partai reguler yang mendukung partainya baik dalam situasi baik maupun dalam situasi buruk. Tipe kedua adalah amatir, mereka sangat berorientasi pada isu dan dimotivasi oleh insentif bertujuan yang melihat aktivis partai hanya salah satu alat mencapai tujuan politik yang penting.

Menurut Harshey, partai politik dengan sktivis partai amatur akan memiliki prilaku yang berbeda dengan partai yang didominasi aktivis partai profesional.²³ Aktifis amatur digambarkan menjadi partai politik yang bergerak dengan isu-isu dan prinsip-prinsip tertetu, bagi mereka isu adalah tujuan dan partai adalah alat pencapai tujuan. Loyalitas aktivis amatur kepada partai berbanding lurus dengan komitmen partai terhadap isu-isu strategis. Mereka kurang dapat membuat kompromi dengan posisi mereka untuk memenangkan pemilu. Kedepan tipe amatur akan muncul secara aktif memainkan peran partisipatif di dalam organisasi partai dengan perhatian pada isu-isu top partai sebagai agenda dan ketika mereka memimpin partai mereka sering membawa angin perubahan yang kuat baik dalam urusan internal partai maupun dalam sistem politik yang ada.

Sedangkan pada tipe profesional atau pragmatis tujuan mereka adalah sukses dalam pemilihan, posisi isu dan kandidat adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Mereka mempercayai bahwa memenangkan pemilu adalah dengan jalan memaikan isu dan memoderasi posisi atau menominasikan kandidat yang populer tetapi bukan dengan memainkan isu yang utama. Pada titik ini pemimpin partai kemudian harus menemukan keseimbangan antara pemerintah dengan aktifis partai yang tumbuh dengan orientasi isu, aktivis purist, dan kolega pragmatis mereka.

²³ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 102.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁴ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu dalam kata lain merupakan penafsiran penting dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Berkaitan dengan ini Samuel P. Huntington dalam *Sahid Gatara* menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara kolektif oleh rakyat yang akan mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara suptansial, yakni demokrasi dalam artian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian maka rakyat lah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Pemilu yang bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat Sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tercapainya penyelenggaraan demokrasi di

²⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: UGM 2010 ,Hal.72.

suatu negara. Pemilu yang istilahkan sebagai pesta demokrasi dimana dalam momentum ini rakyat akan memberikan wewenang kepada para calon peserta pemilu untuk mewakili segala bentuk keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik itu skala lokal maupun nasional.

Di Indonesia Pemilu dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun sekali sejak pemilu pertama tahun 1956 sampai dengan pemilu 2014 Indonesia sudah melakukan pemilihan umum sebanyak sebelas kali pemilihan dengan tiga rangkaian pemilu yaitu:

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara.

2) Pemilu Kepala Daerah

Yaitu pemilihan kepala daerah Gubernur sebagai kepala daerah tingkat Provinsi dan Bupati sebagai kepala daerah ditingkat kabupaten.

3) Pemilu Parlemen (DPR, DPD, DPRD).

Yaitu pemilihan perwakilan legislatif DPR untuk tingkat nasional, DPD sebagai perwakilan tingkat daerah, dan DPRD untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

Menurut Harris G Warren dkk. Pemilu merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan untuk memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh

pemerintah, dan dalam membuat keputusan itu para warga menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.²⁵

Dalam kacamata politik pemilu juga disebut sebagai aktivitas pemasaran politik (*Political Marketing*) yang artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (*Partai Politik*) dengan pemilih (*Rakyat*) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (*Radio*) maupun audio visual (*televisi*) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (*tatap muka*) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.²⁶

Pemilihan umum merupakan momen krusial bagi partai politik untuk menunjukkan kepada publik bagaimana partai politik bekerja menyikapi pemilu, disini dapat dilihat bagaimana partai politik menjalankan fungsinya sebagaimana tuntutan dari kebutuhan publik agenda-agenda politik seperti rekrutmen kandidat, manajemen kampanye dan koalisi

²⁵ Haryanto. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta 1984.: Liberty. Hlm 56.

²⁶ A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta. 2007: Graha Ilmu. Hal 147.

politik akan terlihat sebagaimana pedagang menawarkan dagangannya bahkan tidak jarang hal itu dipertontonkan secara vulgar.

Pemilihan umum merupakan momen penting bagi partai politik untuk menunjukkan eksistensinya kepada publik, keadaan ini yang mendorong setiap bagian dari mesin politik partai untuk bekerja lebih keras dari rutinitas yang biasanya, melibatkan jaringan-jaringan partai yang terhubung, dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki setiap partai politik baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk dukungan politik.

F. Definisi Konseptual

Definisi dari konseptual adalah suatu metode untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, dan konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah:

1. Partai politik adalah organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui gagasan menempatkan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaanya dalam pemilihan umum.
2. Fungsi-fungsi partai politik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan partai politik guna menjaga kelangsungan hidup partai

melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari partai politik, yang didasarkan pada kaidah-kaidah tujuan dan peraturan partai.

3. Rekrutmen politik adalah proses dimana partai politik melakukan pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
4. Pemilihan umum adalah serangkaian kegiatan dalam mengaplikasikan prinsip demokrasi dimana rakyat dilibatkan dalam proses politik melalui pemilihan umum sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, dilaksanakan secara langsung dengan prinsip umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia, berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel.²⁷ Dengan kata lain definisi operasional ini akan memberikan gambaran mengenai variabel apa saja yang dapat digunakan untuk membantu sebuah penelitian.

1. Alur Rekrutmen Politik Partai
 - a. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang memenuhi tahap

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989 hal.

sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal masing-masing partai.

- b. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan masing-masing partai.
- c. Tahap Pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu dari masing-masing kandidat yang diusung partai.

2. Pengorganisasian Rekrutmen Politik Partai

- a. Penominasian kandidat (siapa kandidat yang dapat dinominasikan?)
 - Inklusif (Setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai)
 - Eksklusif (Membatasi hak pemilih ikut dalam seleksi kandidat anggota partai + syarat tambahan).
- b. Penyeleksi kandidat (siapa yang menyeleksi?)
 - Pemilih (Inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu)
 - Pimpinan Partai (Eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai)
- c. Kandidat diseleksi (dimana kandidat diseleksi?)
 - Sentralistik (secara eksklusif kandidat diseleksi oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur

yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional).

- Desentralisasi (secara eksklusif kandidat diseleksi oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok seksional).

d. Kandidat diputuskan (baimana kandidat diputuskan ?)

- Otoriter (penunjukan dalam artian semua kandidat hanya ditunjuk oleh pimpinan partai tanpa melalui proses seleksi)
- Demokratis (dalam artian semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moh. Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi serta suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Sementara Koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁸

²⁸ Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: 2010. Salemba Humanika. Hlm 9.

Selanjutnya metode penelitian deskriptif ini sering disertai ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Sedangkan yang dimaksud deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa data yang telah masuk untuk kemudian diadakan pengelolaan dari data tersebut sehingga akan tersusun dalam bentuk pengurutan, gambaran, dan pengklasifikasian terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengaalisis kebijakan-kebijakan partai politik yang berkaitan dengan pola rekrutmen politik, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

2. Jenis Data

Adapun data yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

- a. Data primer

²⁹ Winarno Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung:Alfabeta.1982, Hal 140.

Data primer adalah data yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi/institusi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari pimpinan DPW Partai PPP, dan DPW Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber data utama. Diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*) menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti: arsip atau dokumen partai, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah rekrutmen politik yang dilakukan oleh masing-masing partai politik yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara.

Wawancara adalah teknik percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁰ Dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam maka profesionalitas merupakan poin penting dalam memperoleh data obyektif yang akan terungkap melalui wawancara tersebut. Dalam hal ini, wawancara untuk mendapatkan informasi terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai PPP dan Partai NasDem, peneliti berencana akan memfokuskan wawancara pada pimpinan DPW Partai PPP, dan DPW Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.4

Daftar Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Pimpinan Partai PPP atau anggota LP2 (Sukri Fadholi ketua DPW PPP DIY)	1 orang
2.	Kandidat Caleg terpilih (Edy Susila)	1 orang
3.	Kandidat Caleg tidak lolos pemilu (Siti Nurjanah)	1 orang
4.	Pimpinan Partai NasDem atau anggota Bappilu (Fedelis Indriarto ketua Bappilu)	1 orang
5.	Kandidat Caleg terpilih (Subarno)	1 orang
6.	Kandidat Caleg tidak lolos pemilu (Cornus Dwisapha Hekseko)	1 orang
Total		6 orang

³⁰ Winarno Surakhma, Ibid.Hal.92.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal atau variabel yang berasal bukan dari sumber utama. Data dokumentasi yang dapat digunakan disini antara lain seperti arsip organisasi, surat kabar ataupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sumber informasinya. Data-data yang akan peneliti gunakan disini adalah data yang berhubungan dengan rekrutmen politik masing-masing partai seperti, data calon kandidat, prosedur rekrutmen politik yang ditetapkan masing-masing partai, persyaratan dalam rekrutmen politik, data kandidat atau calon, dan data lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan pola rekrutmen politik yang dilakukan masing-masing partai.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini sering digunakan media statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyerderhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi formasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.³¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan menggunakan teknik analisa

³¹ Sofian Effendi Dan Chris Maning , *Metode Penelitian Survei*. Jakarta,, 2008, Hal 163.

kualitatif interpretatif untuk menganalisa bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik antara partai politik Islam (PPP) dan partai politik Nasionalis (NasDem) pada pemilu 2014 di tingkat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan skala dari obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Sehingga interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi dan gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Pengklasifikasian dalam teknik analisa data ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin yaitu:³²

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan

³² Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003 hal 70.

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta

yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

5. Unit Analisis Data

Dalam Unit analisa data yang hendak penulis teliti disini ialah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem (DPW NasDem) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai interpretasi dari partai politik Islam dan Nasionalis.